

IMPLEMENTASI PROGRAM PETI KOIN BERMANTRA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN NELAYAN DI PELABUHAN TAMPERAN, KABUPATEN PACITAN, JAWA TIMUR

Salsa Oktaviana^{1*}, Pratiwi Dwi Karjati², Gigih Pratomo³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email Correspondence: salsaoktaviana10@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: July 11, 2026

Revised: July 12, 2026

Accepted: July 13, 2026

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kemiskinan, Nelayan, Ekonomi Kelautan, Kesejahteraan Masyarakat

Keywords: Public Policy, Poverty, Fishermen, Marine Economy, Community Welfare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Peti Koin Bermantra (Peremberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera) dalam upaya memberdayakan ekonomi nelayan di Pelabuhan Tamperan, Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih karena meskipun sektor perikanannya potensial, masyarakat nelayan msetempat masih tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem (Desil 1). Informan penelitian ini sebanyak 10 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pisau analisis yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle, yang membedah fenomena melalui dua variabel utama yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Peti Koin Bermantra di Pelabuhan Tamperan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam mengubah kondisi ekonomi nelayan secara signifikan. Temuan utama menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan riil nelayan. Selain itu, proses pengambilan keputusan yang bersifat top-down menyebabkan kebutuhan riil nelayan kurang terakomodasi secara maksimal. Simpulan dari penelitian ini adalah program telah berhasil dalam penyaluran bantuan teknis, namun memerlukan kesesuaian lebih lanjut antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan spesifik nelayan untuk mewujudkan pemberdayaan yang sesuai dengan tujuan.

ABSTRAK

This study aims to examine the implementation of the Peti Koin Bermantra Program (Collaborative, Inclusive, Sustainable, Independent, and Prosperous Economic Empowerment) in improving the economic conditions of fishermen at Tamperan Harbor, Pacitan Regency. The study focuses on this location because, despite its strong fisheries potential, many local fishermen remain classified as living in extreme poverty (Decile 1). A qualitative research approach was employed, involving ten informants, with data analyzed using Merilee S. Grindle's Policy Implementation Theory, which emphasizes two key dimensions: policy content and implementation context. The findings reveal that the program has been implemented in accordance with existing regulations and has successfully distributed technical assistance

to fishermen. However, its effectiveness in significantly improving fishermen's economic welfare remains limited. A major issue identified is the mismatch between the assistance provided and the actual needs of the fishing community. In addition, the predominantly top-down decision-making process has reduced opportunities for fishermen to express their priorities, resulting in limited responsiveness to local conditions. Overall, the study concludes that while the program has achieved its administrative objectives, stronger alignment between government policies and the specific needs of fishermen is essential to ensure sustainable economic empowerment and achieve the program's intended outcomes.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan pembangunan yang kompleks di Indonesia dan merupakan bagian dari agenda global melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan penghapusan kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, serta sumber daya ekonomi yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat (Ariestawati & Pertiwi, 2025). Di Jawa Timur, jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 3,893 juta jiwa atau sebesar 9,30% dari total penduduk, dengan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 13,19%, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 6,83% (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan ketergantungan terhadap sektor primer. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan agar tujuan pembangunan yang inklusif dapat tercapai (Prasetyo et al., 2024).

Salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan adalah Kabupaten Pacitan, yang termasuk dalam kategori desil 1 dengan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah meskipun memiliki potensi kelautan yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, produksi perikanan tangkap Pacitan hanya mencapai 17.501.596 kg dengan nilai produksi sebesar Rp227.050.961.700, terendah dibandingkan tujuh kabupaten pesisir lainnya di Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2026). Rendahnya kesejahteraan nelayan tidak hanya disebabkan oleh hasil tangkapan, tetapi juga dipengaruhi oleh akses pasar yang terbatas, tingginya biaya operasional melaut, keterbatasan modal, serta ketergantungan terhadap musim dan kondisi cuaca (Gushendri et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan juga

ditentukan oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kondisi tempat tinggal yang masih terbatas di berbagai wilayah pesisir Jawa Timur (Yahya & Pudjihardjo, 2024). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya potensi sumber daya kelautan belum mampu memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan Program Peti Koin Bermantra (Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui bantuan aset, bimbingan teknis, dan penguatan kemitraan pasar (Prasetyo et al., 2024). Program ini menyasar kelompok masyarakat pada sektor produktif, termasuk nelayan yang tercatat dalam basis data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 dan desil 2. Di Kabupaten Pacitan, program diwujudkan melalui pemberian bantuan peralatan melaut dan pendampingan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan nelayan. Namun, efektivitas implementasi program tersebut masih perlu dikaji karena keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh penyaluran bantuan, tetapi juga oleh kesesuaian program dengan kebutuhan nyata masyarakat penerima manfaat (Merilee S. Grindle, 1980). Oleh sebab itu, evaluasi implementasi program menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan pemberdayaan ekonomi nelayan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan nelayan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Hormati dkk. menemukan bahwa kebijakan pemberdayaan telah dilaksanakan melalui bantuan alat tangkap dan pelatihan, tetapi masih terkendala koordinasi antarinstansi sehingga pelaksanaannya belum optimal (Hormati et al., 2019). Penelitian lain menunjukkan bahwa keterbatasan pendampingan, minimnya akses informasi, dan lemahnya pengembangan usaha menjadi faktor yang menghambat keberhasilan program pemberdayaan nelayan (Madjid, 2020). Selain itu, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh peran pemangku kepentingan, sinergi antarlembaga, serta keberlanjutan program setelah bantuan diberikan kepada masyarakat (Hutueuly, 2023). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat pesisir secara nyata.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada implementasi Program Peti Koin Bermantra sebagai program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi yang secara khusus menyasar nelayan di Pelabuhan Tamperan, Kabupaten Pacitan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas pemberdayaan nelayan secara umum, penelitian ini menelaah kesesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan riil nelayan serta faktor-faktor implementasi yang memengaruhi keberhasilan program. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menekankan aspek isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengisi kesenjangan empiris mengenai implementasi Program Peti Koin Bermantra pada sektor perikanan tangkap.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi Program Peti Koin Bermantra dalam pemberdayaan nelayan di Pelabuhan Tamperan, Kabupaten Pacitan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan program berlangsung, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan nelayan sebagai penerima manfaat. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai realitas implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan program pemberdayaan nelayan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan Program Peti Koin Bermantra dalam pemberdayaan nelayan di Pelabuhan Tamperan. Implementasi kebijakan dipahami sebagai proses menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta kondisi lingkungan yang memengaruhi keberhasilan program (Aneta, 2010). Penelitian ini memilih model implementasi Merilee S. Grindle karena mampu menjelaskan keberhasilan implementasi melalui

dua dimensi utama, yaitu content of policy dan context of implementation (Grindle, 1980). Dibandingkan model George C. Edward III maupun Van Meter dan Van Horn, model Grindle dinilai lebih sesuai karena mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi yang saling berkaitan (Grindle, 1980). Dimensi content of policy meliputi kepentingan yang terpengaruh, manfaat kebijakan, derajat perubahan yang diharapkan, pengambilan keputusan, pelaksana program, serta sumber daya yang digunakan. Sementara itu, dimensi context of implementation mencakup kekuasaan dan strategi aktor, karakteristik institusi, serta kepatuhan dan respons pelaksana terhadap kebijakan (Firdaus et al., 2024). Kedua dimensi tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan Program Peti Koin Bermantra dengan kebutuhan nelayan di Pelabuhan Tamperan.

Selain teori implementasi kebijakan, penelitian ini juga menggunakan teori ekonomi kelembagaan yang dikemukakan Douglas C. North untuk menjelaskan pentingnya peran institusi dalam mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi (Akmalia et al., 2024). Teori ini menekankan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antarlembaga, aturan yang berlaku, dan partisipasi kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, teori ekonomi kelembagaan digunakan untuk menganalisis peran Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Pelabuhan Perikanan Tamperan, serta nelayan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan Program Peti Koin Bermantra. Dengan demikian, sinergi kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program pemberdayaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan nelayan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pendampingan, serta belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat pesisir (Hormati et al., 2019). Penelitian lain juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kesesuaian bantuan, dukungan kelembagaan, dan keberlanjutan program setelah bantuan diberikan kepada masyarakat (Hutuely, 2023). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji implementasi Program Peti Koin Bermantra pada nelayan di Pelabuhan Tamperan dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Grindle.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Program Peti Koin Bermantra dalam pemberdayaan nelayan di Pelabuhan Tamperan, Kabupaten Pacitan. Objek penelitian adalah implementasi program yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, sedangkan informan dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam program. Informan terdiri atas nelayan penerima manfaat, Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB), penyuluh Program Peti Koin Bermantra, dan pegawai UPT Pelabuhan Tamperan. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang berasal dari literatur, dokumen, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menjamin keabsahan data (Sugiyono, 2023). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara berkesinambungan. Data dianalisis berdasarkan indikator content of policy dan context of implementation untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi Program Peti Koin Bermantra di Pelabuhan Tamperan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi program dalam mendukung pemberdayaan ekonomi nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Peti Koin Bermantra Pada Kemiskinan Nelayan di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan

Program Peti Koin Bermantra merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dihadirkan pemerintah sebagai 354paya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat rentan seperti nelayan. Program ini bertujuan mendukung kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan 354paya354g, E-BKP dan dukungan terhadap aktivitas produktif masyarakat. Pada masyarakat nelayan di Pelabuhan Tamperan Pacitan, Program Peti Koin Bermantra diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi, menunjang

aktivitas melaut, serta mendukung 355paya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.

Untuk menganalisis Implementasi Program Peti Koin Bermantra pada Kemiskinan Nelayan di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan diperlukan teori yang sesuai, yaitu Teori Merilee S. Grindle. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang telah dirumuskan, tetapi juga dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan konteks (context of implementation) yang melingkupinya.

Content of Policy

Kepentingan yang Terpengaruh (Interest Affected) menunjukkan bahwa Program Peti Koin Bermantra telah menargetkan nelayan lokal di Pelabuhan Tamperan sebagai kelompok sasaran melalui penyaluran bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB). Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan difokuskan bagi nelayan lokal dan didistribusikan melalui KUB, sebagaimana disampaikan penyuluh program, "fokusnya di Tamperan ini hanya buat nelayan lokal, kemudian bantuan diberikan kepada masing-masing KUB bukan ke masing-masing nelayan" (Wawancara Pak Yahya, 20 Mei 2026). Namun, kepentingan nelayan belum sepenuhnya terakomodasi karena bantuan jaring dinilai tidak mencukupi kebutuhan, sementara bantuan E-BKP lebih dirasakan manfaatnya, termasuk bagi anggota KUB yang tidak memiliki kapal melalui mekanisme penggunaan kapal kelompok. Hal tersebut tercermin dari pernyataan nelayan, "kurang puas, kurang sesuai, kuantitasnya kurang" (Wawancara Pak Fajar, 5 Mei 2026), sedangkan ketua KUB menyatakan, "kita butuh paling minim 15 jaring, sedangkan dikasih satu, tidak merata dan tidak memadai" (Wawancara Pak Kecik, 5 Mei 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi program telah mampu mengakomodasi sebagian kepentingan nelayan, khususnya dalam akses BBM bersubsidi, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan alat tangkap sehingga efektivitas pemberdayaan ekonomi masih belum optimal.

Jenis Manfaat (Type of Benefits) pada Program Peti Koin Bermantra diwujudkan melalui bantuan jaring dan E-BKP yang bertujuan mendukung aktivitas penangkapan ikan serta mengurangi biaya operasional nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat bantuan jaring belum optimal karena penggunaannya terbatas pada musim dan jenis ikan tertentu, sebagaimana disampaikan nelayan, "jaringnya cuma dipakai ketika musim tertentu, kalau cari lobster gampang rusak karena ukurannya terlalu besar" (Wawancara Pak Fajar, 5 Mei 2026).

Sebaliknya, bantuan E-BKP dinilai memberikan manfaat nyata karena mempermudah akses BBM bersubsidi, bahkan nelayan yang tidak memiliki kapal tetap dapat memanfaatkannya melalui mekanisme penggunaan kapal milik KUB, sebagaimana dinyatakan, "anggota tetap bisa dapat subsidi kalau mau berlayar, nanti saya yang isi BBM-nya dibuat stok" (Wawancara Pak Sodik, 20 Mei 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat Program Peti Koin Bermantra telah dirasakan oleh nelayan, namun belum sepenuhnya optimal karena bantuan jaring belum sesuai dengan kebutuhan lapangan, sedangkan manfaat E-BKP relatif lebih efektif dan dapat dirasakan secara lebih luas melalui mekanisme kelompok.

Derajat Perubahan yang Diharapkan (*Extent of Change Envisioned*). Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana Program Peti Koin Bermantra mampu menghasilkan perubahan sesuai tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan nelayan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa program diharapkan dapat meningkatkan pendapatan melalui bantuan jaring dan E-BKP. Penyuluh program menyatakan, "adanya program ini harapannya ya supaya para nelayan bisa meningkatkan penghasilan biar memperbaiki ekonomi" (Pak Yahya, Wawancara, 20 Mei 2026). Namun, nelayan mengungkapkan bahwa perubahan ekonomi belum signifikan karena pendapatan masih dipengaruhi musim ikan, cuaca, harga jual, dan biaya operasional. Pak Ari menyampaikan, "Pendapatan satu hari ya gak bisa diperkirakan, tergantung musim ikan, cuaca... jaringnya cuma satu, jadi ya gak langsung kelihatan hasilnya" (Wawancara, 20 Mei 2026). Meskipun demikian, bantuan E-BKP dinilai mampu mengurangi beban biaya operasional melalui akses BBM bersubsidi. Berdasarkan temuan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut menyatakan bahwa semakin besar perubahan yang dirasakan nelayan penerima manfaat, semakin berhasil implementasi Program Peti Koin Bermantra dalam mencapai tujuan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi program telah memberikan perubahan pada aspek pengurangan biaya operasional, tetapi belum mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan secara signifikan sebagaimana tujuan kebijakan menurut Grindle.

Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*). Indikator ini digunakan untuk mengetahui pihak yang berwenang menentukan jenis bantuan, mekanisme pelaksanaan, dan penerima manfaat dalam Program Peti Koin Bermantra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan utama masih didominasi oleh pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan,

sedangkan keterlibatan nelayan lebih bersifat administratif. Penyuluh program menjelaskan, “Bantuan kami tentukan tidak melibatkan nelayan... setelah itu kita jatah setiap kelompok, kemudian ketua kelompok yang mengurus siapa yang ditunjuk untuk mendapatkan” (Pak Yahya, Wawancara, 20 Mei 2026). Pernyataan tersebut didukung oleh nelayan yang menyatakan tidak dilibatkan dalam penentuan jenis bantuan. Pak Kecik mengungkapkan, “kita gak dilibatkan mbak, cuma dikasih undangan kalau mau ada Bu Gubernur datang ngasih bantuan” (Wawancara, 20 Mei 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan masih bersifat top-down, sehingga beberapa bantuan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nelayan di lapangan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, menyatakan bahwa semakin besar keterlibatan nelayan dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar peluang bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok sasaran. Temuan ini sejalan dengan pandangan Grindle bahwa letak pengambilan keputusan menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Pelaksana program (Program Implementors). Indikator ini digunakan untuk menilai peran dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan Program Peti Koin Bermantra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana program meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, UPT Pelabuhan Perikanan Tamperan, serta pemerintah kelurahan yang telah melaksanakan penyaluran bantuan sesuai kewenangannya. Penyuluh program menjelaskan, “Memang tugas kami melaksanakan program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dari pusat kepada kelompok nelayan sampai proses penyaluran bantuan diterima dengan baik” (Pak Yahya, Wawancara, 20 Mei 2026). Meskipun bantuan telah tersalurkan dan diterima nelayan, beberapa informan menilai jumlah dan spesifikasi bantuan masih belum sesuai kebutuhan. Pak Sodik menyampaikan, “Bantuan sudah diberikan mbak kepada kami... tapi ya itu tadi menurut kami masih belum sesuai” (Wawancara, 20 Mei 2026). Berdasarkan temuan tersebut menyatakan bahwa semakin jelas peran dan tanggung jawab pelaksana program serta semakin baik pelaksanaan tugasnya, semakin efektif implementasi Program Peti Koin Bermantra. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksana telah menjalankan fungsi implementasi, namun efektivitas program masih perlu ditingkatkan agar manfaat bantuan lebih sesuai dengan kebutuhan nelayan sebagaimana dijelaskan oleh Grindle.

Sumber Daya yang Digunakan (Resourch Committed). Indikator ini digunakan untuk menilai kecukupan sumber daya yang mendukung implementasi Program Peti Koin Bermantra, baik berupa bantuan fisik maupun nonfisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya program terdiri atas bantuan 358alua358g dan E-BKP sebagai akses BBM bersubsidi. Salah satu nelayan menjelaskan, “Nelayan di Tamperan hanya menerima bantuan 358alua358g saja dan beberapa orang dapat E-BKP” (Pak Sodiq, Wawancara, 20 Mei 2026). Meskipun demikian, nelayan menilai bantuan 358alua358g masih terbatas dari segi jumlah dan kesesuaian kebutuhan, sedangkan E-BKP lebih dirasakan manfaatnya karena mampu mengurangi biaya operasional. Pak Ikhwan menyampaikan, “E-BKP itu bisa saya pakai untuk bantuan subsidi BBM... jadi 358alua mau cari ikan saya isi BBM subsidi itu pakai E-BKP” (Wawancara, 28 Juni 2026). Berdasarkan temuan tersebut, menyatakan bahwa semakin memadai ketersediaan sumber daya fisik dan nonfisik, semakin efektif implementasi Program Peti Koin Bermantra. Temuan ini menunjukkan bahwa program telah didukung oleh sumber daya yang relevan, tetapi keterbatasan jumlah dan kesesuaian bantuan fisik masih menghambat pencapaian tujuan implementasi sebagaimana dijelaskan oleh Grindle.

Context of Implementation

Indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dalam teori Grindle menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menjadi aktor utama yang menentukan jenis bantuan, sasaran penerima, dan mekanisme penyaluran Program Peti Koin Bermantra, sedangkan UPT Tamperan dan pemerintah kelurahan berperan sebagai pelaksana teknis, serta nelayan sebagai penerima manfaat. Hal ini ditegaskan oleh Pak Bayu, “Pihak yang paling berkuasa ya pihak pemerintah... kami hanya pelaksana di lapangan aja” (Wawancara, 5 Mei 2026). Meskipun pemerintah dan nelayan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan, dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan menyebabkan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nelayan. Sebagaimana disampaikan Pak Kecik, “Bantuan ini bermanfaat, tapi jaringnya cuma satu ukuran saja, sedangkan setiap hari tidak musim tongkol” (Wawancara, 5 Mei 2026). Berdasarkan temuan tersebut menyatakan bahwa implementasi Program Peti Koin Bermantra akan lebih efektif apabila terdapat keselarasan kepentingan antara pemerintah dan nelayan serta keterlibatan nelayan dalam

pengambilan keputusan sehingga bantuan yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Indikator karakteristik institusi dan rezim dalam teori Grindle menunjukkan bahwa implementasi Program Peti Koin Bermantra melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur sebagai penanggung jawab, UPT Pelabuhan Perikanan Tamperan sebagai pelaksana teknis, penyuluh, ketua KUB, serta nelayan sebagai penerima manfaat. Struktur kelembagaan dan pembagian tugas telah berjalan dengan jelas, sebagaimana disampaikan Pak Andung, “DKP menggandeng UPT Tamperan, kelurahan, ketua-ketua KUB, terus ke nelayannya” (Wawancara, 28 Juni 2026). Namun, mekanisme pelaksanaan masih didominasi pemerintah (top-down) sehingga nelayan tidak dilibatkan dalam penentuan jenis maupun jumlah bantuan. Hal ini diungkapkan Pak Ari, “Kami menerima saja, kalau jenis dan jumlah ditentukan dari atas” (Wawancara, 20 Mei 2026). Kondisi tersebut menyebabkan beberapa bantuan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nelayan di lapangan. Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin jelas struktur kelembagaan, pembagian tugas, dan kewenangan antar pelaksana disertai meningkatnya partisipasi nelayan dalam proses pengambilan keputusan, maka semakin efektif implementasi Program Peti Koin Bermantra dalam mencapai tujuannya.

Indikator kepatuhan dan respons pelaksana dalam teori Grindle menunjukkan bahwa pelaksana Program Peti Koin Bermantra telah menjalankan tugas sesuai prosedur melalui penyaluran bantuan jaring dan E-BKP kepada kelompok nelayan. Hal ini dibenarkan oleh Pak Ikhwan, “Tidak ada kecurangan, jaring dan E-BKP sudah diberikan kepada nelayan” (Wawancara, 28 Juni 2026). Namun, dari aspek responsivitas, bantuan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nelayan karena keterbatasan jumlah dan jenis bantuan. Pak Sodik menyatakan, “Jaringnya bermanfaat, tapi tidak sesuai ukurannya dan kuantitasnya, jadi tidak bisa dipakai setiap saat” (Wawancara, 20 Mei 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksana telah patuh terhadap ketentuan program, tetapi respons terhadap kebutuhan riil nelayan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaksana terhadap prosedur dan semakin responsif pelaksana dalam menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka semakin optimal implementasi Program Peti Koin Bermantra.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi Program Peti Koin Bermantra telah berjalan, tetapi belum optimal dalam pengentasan kemiskinan nelayan. Keterbatasan jumlah dan jenis bantuan, minimnya keterlibatan nelayan dalam pengambilan keputusan, belum terlihatnya peningkatan kesejahteraan yang signifikan, serta mekanisme implementasi yang masih bersifat top-down menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas program.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Peti Koin Bermantra dalam upaya pengentasan kemiskinan nelayan di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan dipengaruhi oleh ketepatan sasaran program, kesesuaian manfaat yang diberikan, kemampuan program dalam menciptakan perubahan kesejahteraan, keterlibatan nelayan dalam pengambilan keputusan, kejelasan peran pelaksana, ketersediaan sumber daya, keselarasan kepentingan antaraktor, kejelasan struktur kelembagaan, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana program. Apabila seluruh aspek tersebut dapat berjalan secara sinergis dan sesuai dengan kebutuhan nelayan sebagai kelompok sasaran, maka tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan nelayan dapat tercapai secara optimal. Sebaliknya, jika salah satu aspek tersebut belum berjalan dengan baik, maka implementasi program berpotensi mengalami kendala sehingga tujuan pengentasan kemiskinan belum tercapai secara optimal. Implementasi Peti Koin Bermantra di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan telah terlaksana, namun belum berjalan secara optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji Program Peti Koin Bermantra dengan menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda, serta meneliti dampak program terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan secara kuantitatif. Selain itu, penelitian dapat dilakukan pada wilayah penerima program lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program Peti Koin Bermantra.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, T., Arifah, N., & Lutfyansyah, Y. S. (2024). *Analisis teori ekonomi kelembagaan atau institusional dan relevansinya pada perekonomian di Indonesia* (Vol. 9, Issue 2).
- Aneta. (2010). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). *Kemiskinan Provinsi Jawa Timur*.

- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gushendri, Aimon, H., & Sentosa, S. U. (2023). Analysis of catch and fishermen family welfare in West Sumatra Province: Simultaneous equation approach. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(5), 1329–1338. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180503>
- Hormati, G., Mantiri, M., & Singkoh, F. (n.d.). *Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Nagha 1 Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe*.
- Hutuey, I., La Dimuru, A. H., & Kataloka Ambon, S. A. A. (2025). Implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir. *Journal Administration and Public Service*, 5. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index>
- Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia (Studi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016–2021)*. (n.d.).
- Implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir Kampung Urumb Kabupaten Merauke*. (n.d.).
- Madjid, L. (2020). *Implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon* (Vol. 14, No. 2).
- Prasetyo P, E. J., Ni, C., Sari, M. K., Universitas Islam Raden Rahmat Malang, & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. (2024). Meningkatkan pendapatan masyarakat Supit Urang Makmur melalui Program Peti Koin Bermantra. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 126–139. <https://doi.org/10.33379/tepiswiring.v3i2.4752>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- R., A. P. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Polewali Mandar: Kajian atas tiga model implementasi. *Journal Peqquruang: Conference Series*, 7(2), 480. <https://doi.org/10.35329/jp.v7i2.6260>
- Yahya, K., & Pudjihardjo, M. (2024). Analisis tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(3), 943–957. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.3.22>